



REVIU RENCANA STRATEGIS

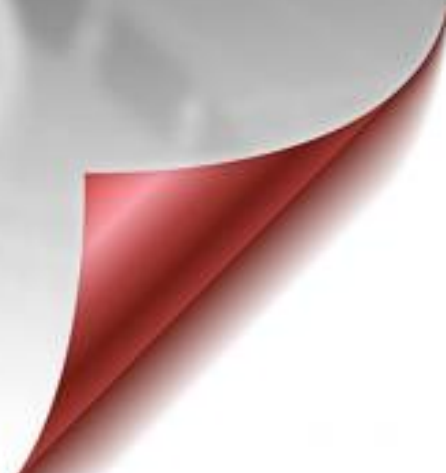
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kota Bontang

Tahun 2016-2021



*Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lt. 1
Jl. Moh. Roem Bontang Lestari*



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021 sebagai rujukan semua perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang merupakan dokumen penting yang menjadi acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang memuat gambaran tentang kinerja pelayanan, isu isu strategis yang perlu diselesaikan, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan setiap tahunnya.

Akhirnya tak lupa kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

Bontang, Januari 2018

Kepala,



Ir. Zulkifli, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19620731199301 1 001

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG	7
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	7
A. Kepala Badan	9
B. Sekretaris	9
C. Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur	10
D. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	10
E. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	11
2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	12
A. Sumber Daya Manusia	12
B. Sarana dan Prasarana	14
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	22
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	45
4.2 Strategi dan Kebijakan	48
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	55
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	80
BAB VII PENUTUP	83

Daftar Tabel

	halaman
Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan 13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan 13
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan 14
Tabel 2.4	Prasarana dan Sarana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2011– 2016 18
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2011-2016 21
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi 28
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 32
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 34
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 35
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 36
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 37
Tabel 3.7	Identifikasi Isu-isu Strategis 38
Tabel 3.8	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis 39
Tabel 3.9	Nilai Skala Kriteria 39
Tabel 3.10	Hasil Pembobotan dan Penentuan Peringkat Isu Strategis 40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan..... 46
Tabel 4.2	Penentuan Alternatif Strategi 50
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 53
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan Tahun 2016 55
Tabel 5.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017-2021 63

Daftar Gambar

halaman

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang	8
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2). Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a). rencana pembangunan jangka panjang daerah; b). rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c). rencana pembangunan tahunan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang, sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan juga berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra).

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum terdapat tiga perubahan lingkungan strategis yang harus dihadapi selama ini dan masa yang akan datang yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi. **Demokratisasi:** yang menuntut adanya partisipasi yang luas dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan di lingkungannya; **Desentralisasi:** yang menuntut adanya ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; **Globalisasi:** yang telah membuka akses teknologi dan arus informasi sehingga nilai-nilai sosial budaya yang baru dapat mempengaruhi sistem nilai yang telah berkembang di masyarakat.

Rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan mengacu pada RPJMD Kota Bontang untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW Kota Bontang, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Dengan demikian dengan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ini diharapkan dapat menentukan arah perkembangan organisasi dalam meningkatkan kinerja, dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) periode 2016-2021 ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Perencanaan strategis harus dilaksanakan secara selaras, seimbang, dan komprehensif namun tetap memiliki prioritas-prioritas dalam pelaksanaannya karena setiap komponen dalam renstra memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lain.

Rencana strategis ini disusun untuk mengarahkan peran dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam kurun waktu lima tahun kedepan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bontang sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 yang selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam

rencana kerja (Renja) setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012 – 2030;
13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016 - 2021;
15. Peraturan Walikota Bontang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Bontang tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- 2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/PPN dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur serta Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- 4.2 Strategi dan Kebijakan PD

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

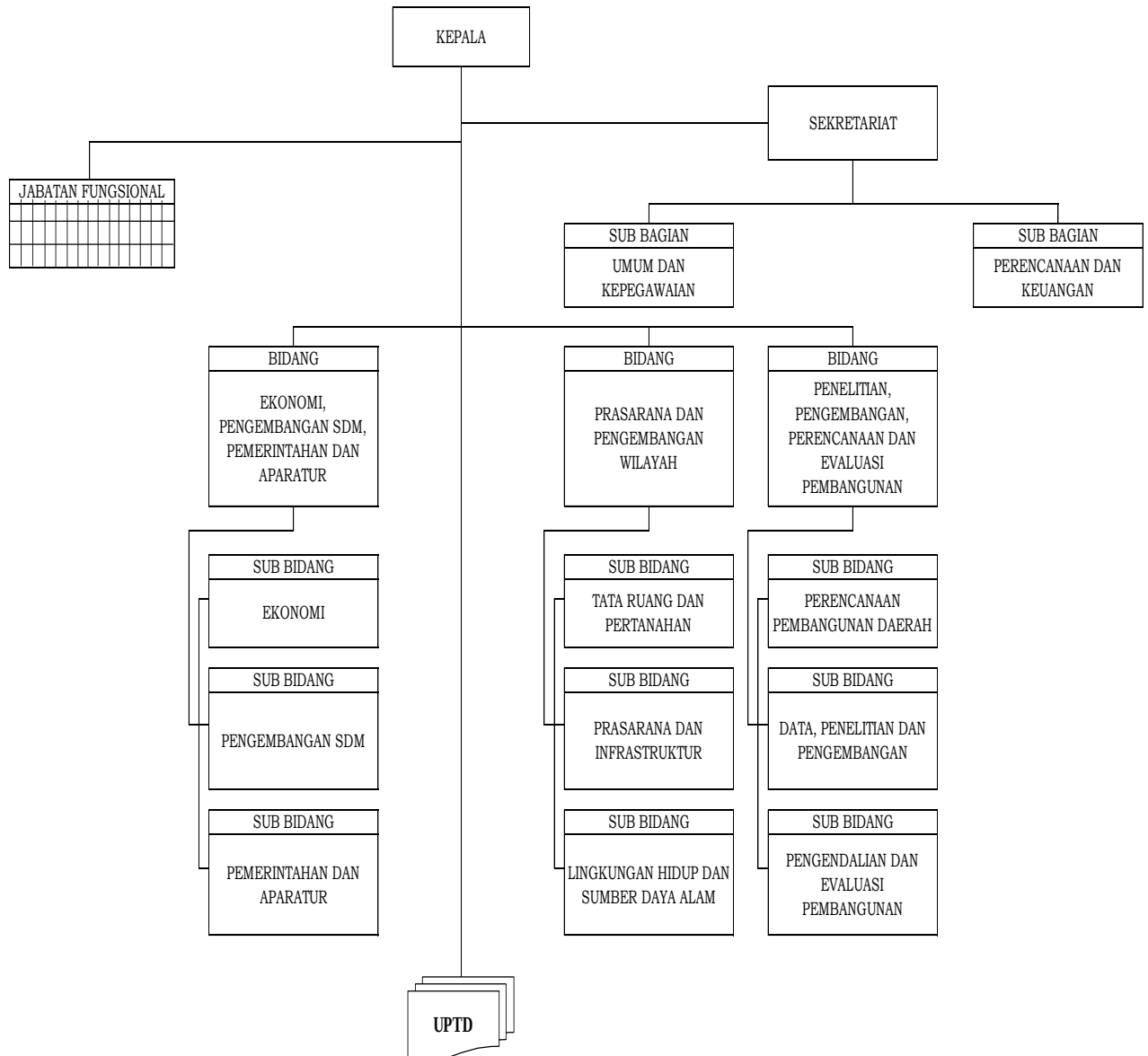
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
 - b. Sub Bidang Prasarana dan Infrastruktur;
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
5. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Kota Bontang dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016)



Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 40 Tahun 2016, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Tugas Pokok

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi

- ❑ Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- ❑ Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ❑ Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ❑ Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ❑ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ❑ Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan SKPD;
- ❑ Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- ❑ Pelaksanaan tugas lain-lain.

B. Sekretaris

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan.

Fungsi

- ❑ Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- ❑ Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan SKPD;
- ❑ Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- ❑ Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan;

- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor;
- ☐ Pengoorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- ☐ Pelaksanaan tugas lain-lain.

C. Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan ekonomi, pengembangan SDM, pemerintahan dan aparatur secara makro.

Fungsi

- ☐ Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi secara makro;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan SDM secara makro;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan aparatur secara makro;
- ☐ Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- ☐ Pelaksanaan tugas lain-lain.

D. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pembangunan wilayah dan prasarana wilayah

Fungsi

- ☐ Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan penataan ruang;

- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan pekerjaan umum;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan pertanahan;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan lingkungan hidup;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan perhubungan;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan komunikasi dan informatika;
- ☐ Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- ☐ Pelaksanaan tugas lain-lain;

E. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan penelitian, pengembangan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah

Fungsi

- ☐ Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi data perencanaan pembangunan dan data hasil pembangunan daerah;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- ☐ Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- ☐ Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- ☐ Pelaksanaan tugas lain-lain.

F. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan perencanaan.

2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

A. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi pemerintah secara keseluruhan karena aparatur pemerintah merupakan subyek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Sebaik apapun suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menguatkan peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai *think tank* dan *koordinator* dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan maupun tugas-tugas lainnya dari Walikota seperti pengentasan kemiskinan yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis untuk dilaksanakan pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang mempunyai personil sebanyak 41 orang pegawai terdiri dari 34 orang dengan status pegawai negeri sipil (PNS), dan 7 orang tenaga honorer.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang kepala bidang; 8 (delapan) orang Eselon IV dan non eselon 29 orang.

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Jabatan
(September 2016)

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1				1
2	Sekretariat		1	2	9	12
3	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah		1	2	5	8
4	Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur		1	2	6	9
5	Bidang Litbang, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan		1	2	8	11
	Jumlah	1	4	8	28	41

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, 2016

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat Dan Golongan
(September 2016)

Status Kepegawaian/Pangkat	Gol. / Ruang	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Unit Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan								Total
				Sekretariat		Bidang Litbang, Perencanaan & Evaluasi Pembangunan		Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah		Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)												
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Pembina Tingkat I	IV/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3. Pembina	IV/a	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4
4. Penata Tingkat I	III/d	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
5. Penata	III/c	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5
6. Penata Muda Tk. I	III/b	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	6
7. Penata Muda	III/a	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	6
8. Pengatur Tk. I	II/d	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
9. Pengatur	II/c	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3
10. Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3
11. Pengatur Muda	II/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12. Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Pegawai Honorer	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	-	7
TOTAL		1	-	9	3	7	4	6	2	7	2	41

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, 2016.

Sedangkan kondisi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(September 2016)

No	Uraian	S2	S1	D 3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	6	-	5	-	12
3	Bidang Litbang, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	2	6	-	3	-	11
4	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	2	5	-	1	-	8
5	Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur	3	4	-	2	-	9
TOTAL		9	21	-	11	-	41

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, 2016

Berdasarkan data profil kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sampai dengan bulan September tahun 2016, sebagian besar (73%) pegawai menamatkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 sebanyak 9 orang (22%) dan pegawai dengan tingkat pendidikan S-1 sebanyak 21 orang (51%). Dengan kondisi tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang mayoritas pendidikan tinggi, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan secara optimal.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah masih belum proporsionalnya jumlah aparatur sesuai dengan analisa jabatan dan beban kerja serta belum tersedianya pejabat fungsional perencana dan peneliti yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Meskipun kebijakan internal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pemerintah Kota Bontang telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, namun hal ini belum menarik minat aparatur untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2016

No	Nama Barang	Jumlah (unit)
1	Kendaraan Roda 4 (Station Wagon)	7
2	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	1
3	Kendaraan Roda 2	12
4	Mesin Ketik Manual	2
5	Mesin Ketik Listrik Portable	2
6	Mesin Absen	1
7	Mesin Calkulator	12
8	Mesin Hitung Uang	1
9	Mesin Foto Copy	1
10	Rak Besi/Metal	7
11	Filling Besi/Metal	14
12	Brand Kas	3
13	Rotary Filling	1
14	Lemari Arsip	47
15	Alat Penghancur Kertas	4
16	Papan Pengumuman	4
17	Papan Tulis	1
18	White Board	11
19	Peta	4
20	Alat Pemotong Kertas	1
21	Overhead Proyektor	2
22	Hardisk 1 TB	1
23	Alat Perekam Suara	2
24	Rak Kayu	9
25	Meja Rapat	49
26	Meja Tambahan	8
27	Kursi Rapat	187
28	Kursi Kerja (Kursi Putar)	59
29	Meja Komputer	3
30	Meja Kerja	47
31	Rak Arsip	16
32	Televisi	7
33	Tustel (Kamera Digital)	6
34	Handy Cam	4
35	Internet	1

36	Komputer P.C. Unit	10
37	Lap Top/Komputer Notebook	50
No	Nama Barang	Jumlah (unit)
38	Printer	58
39	Scaner	4
40	Server	3
41	Modem	1
42	Meja Kerja Pejabat	18
43	Meja Kerja Staf	14
44	Kursi Kerja Pejabat	18
45	Kursi Kerja Staf	14
46	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	8
47	Lemari Buku untuk Pejabat	8
48	Video Mixer	1
49	Film Proyektor	10
50	Layar Film	3
51	GPS	1
52	Telephone	2
53	Telephone (PABX)	6
54	Facsimile	2
55	Peta Digital Kota Bontang	2
56	Peta Ikonos Th 2007	1
57	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1
58	Sistem Informasi Geospasial	1
59	Website Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, 2016

Walaupun secara keseluruhan, dukungan perlengkapan kerja kantor semakin memadai, namun untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan yang semakin handal tetap dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan perlengkapan kerja yang ada, khususnya pengembangan sistem informasi yang ada guna mendukung cara kerja yang semakin efisien, disamping adanya dukungan basis data dan informasi yang semakin handal dan terus diperbaharui. Untuk itu, setiap tahun juga disusun rencana kebutuhan barang dan asset kantor guna memastikan penyediaannya yang efisien dan pemanfaatannya secara efektif.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu: urusan

perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta sebagian urusan penataan ruang, dengan fokus pada ; (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, konsultasi, dan koordinasi, (3) Pengendalian dan Evaluasi, dan (4) Perencanaan Tata Ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi serta kewenangan urusan pemerintahan yang diselenggarakan selama ini. Dengan perubahan nomenklatur ini menempatkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kedalam perangkat daerah type B dengan penambahan 3 (tiga) struktur jabatan eselon IV serta perubahan nomenklatur jabatan pada struktur eselon III dan eselon IV. Disamping itu urusan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berubah dari urusan perencanaan, penataan ruang dan statistik menjadi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta urusan penataan ruang.

Dikarenakan perubahan ini terjadi pada tahun 2016 maka penyajian kinerja pelayanan perangkat daerah pada bagian ini masih merupakan kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2011 – 2015 sebagaimana yang diuraikan pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang
Tahun 2011 – 2015

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase kualitas pelayanan dibidang perencanaan				100	100	100	-	-	96	97.4	100	-	-	96%	97%	100%	-	-
2	Prosentase keterpaduan, keserasian, efektifitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah				90	90	90	-	-	100	100	90	-	-	111%	111%	100%	-	-
3	Prosentase penataan ruang yang terintegrasi dan komprehensif dengan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional				95	95	95	-	-	83.33	100	95	-	-	88%	105%	100%	-	-
4	Prosentase keterpaduan, keserasian, dan efektifitas perencanaan sektoral				95	95	95	-	-	100	100	95	-	-	105%	105%	100%	-	-
5	Prosentase data/informasi/statistik daerah yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan				100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100%	100%	100%	-	-
6	Rasio aparatur yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan Bimtek				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase sasaran indikator RPJMD yang diakomodir di dalam Renstra SKPD				-	-	-	80	90	-	-	-	80	90	-	-	-	100%	100%
8	Prosentase sasaran Renstra SKPD yang diimplementasikan kedalam Renja SKPD				-	-	-	70	80	-	-	-	70	80	-	-	-	100%	100%
9	Prosentase penjabaran program RPJMD didalam program RKPD				-	-	-	95	100	-	-	-	99	100	-	-	-	104%	100%
10	Prosentase pemanfaatn ruang yang sesuai dengan RTRW				-	-	-	75	80	-	-	-	75	78	-	-	-	100%	98%
11	Prosentase program CSR yang sinkron dengan program pemerintah daerah				-	-	-	56	60	-	-	-	75	80	-	-	-	134%	133%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, 2015

Berdasarkan tabel 2.5 di atas menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan memenuhi target yang ditetapkan dengan rasio realisasi capaian pada masing-masing indikator kinerja rata-rata mencapai 100% pada setiap tahunnya kecuali *indikator prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW*, dimana pada tahun 2015 tidak mencapai target disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai RTRW dan lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian dari dinas teknis terkait. Hal ini menunjukkan bahwa tugas-tugas pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan, khususnya terkait dengan penyediaan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Bontang telah terlaksana dengan baik. Meski demikian, dalam pencapaian target tersebut masih dirasakan adanya permasalahan-permasalahan atau kendala yang perlu dicarikan alternatif solusi agar pencapaian target indikator kinerja di masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan-permasalahan yang masih sering timbul dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah selama ini antara lain:

1. Intervensi kepentingan politik yang diluar kendali teknis perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Belum optimalnya integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah;
3. Terjadinya perubahan yang cepat atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perencanaan di tingkat daerah;
4. Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan kota; penilaian kinerja; pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;
5. Koordinasi pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan yang masih lemah;
6. Terbatasnya kapasitas aparatur perencana dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah termasuk dalam analisis beban biaya dan teknis pengendalian dan evaluasi;
7. Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja;
8. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD;

9. Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi dalam suatu sistem informasi manajemen pembangunan kota; dan
10. Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang serta dalam upaya mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan maka, kemampuan pengelolaan pendanaan menjadi salah satu tolok ukur penting terealisasinya target kinerja tersebut. Selama tahun 2011-2015, rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan mencapai Rp. 1.664.525.648,- per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran per tahunnya mencapai Rp. 1.550.142.574,- atau secara persentase realisasi rata-ratanya mencapai 91,67% per tahun.

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah kegiatan perencanaan dan penganggaran, dimana otoritas penganggaran daerah tidak berada pada institusi Badan Perencanaan Pembangunan sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian pula masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan di luar rencana yang telah ditetapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut di dalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi untuk optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

Secara lebih rinci gambaran pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bontang tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang
Tahun 2011 - 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai	2,509,366,342	2,842,709,252	2,991,763,219	3,648,322,019	4,252,937,383	2,243,501,158	2,567,336,243	2,833,113,481	3,146,718,806	3,661,056,289	89.41	90.31	94.70	86.25	86.08	348,714,208	283,511,026
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	3,416,058,500	4,695,133,000	5,113,950,000	4,957,521,000	3,250,106,250	3,136,733,000	4,557,296,000	4,854,985,000	4,856,617,000	3,059,274,550	91.82	97.06	94.94	97.96	94.13	(33,190,450)	(15,491,690)
- Belanja barang dan jasa	4,543,069,050	6,979,582,720	9,988,515,200	10,764,826,000	11,394,728,500	4,131,230,067	6,550,162,708	8,347,103,260	9,710,982,264	10,652,293,254	90.93	93.85	83.57	90.21	93.48	1,370,331,890	1,304,212,637
- Belanja modal	212,950,000	1,964,920,000	2,593,135,000	635,670,000	106,300,000	209,472,000	1,802,769,470	2,544,921,500	626,441,900	99,025,000	98.37	91.75	98.14	98.55	93.16	(21,330,000)	(22,089,400)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, 2015

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah sebagai berikut:

a. Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;
5. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota;
6. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan kecamatan;
7. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN;
8. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan perangkat daerah se-Kota Bontang;
9. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;

11. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri;
12. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
13. Mengoordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
14. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
15. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;

b. Urusan Penataan Ruang

1. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
2. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;
3. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota;
4. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota;
5. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota;
6. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;
7. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
8. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan kecamatan;
9. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan

cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;

10. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;

c. Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Merumuskan kebijakan penelitian dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi daerah;
2. Menyelenggarakan koordinasi penelitian dan pengembangan;
3. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan di Daerah;
4. Memberikan dukungan penyelenggaraan kelitbangan di Daerah;

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, RTRW Kota Bontang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang. Salah satu sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah meningkatnya kualitas data dan informasi serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Sasaran jangka menengah ini merupakan peluang bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar dapat mendukung perencanaan provinsi dan nasional. Melalui sasaran ini Bappeda Provinsi Kalimantan Timur membuka kesempatan bagi kabupaten/kota di Kalimantan Timur termasuk Kota Bontang untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dalam rangka integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat mendukung perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.

Salah satu isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, hal ini juga merupakan isu strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang. Ke depan, pengembangan data dan informasi yang akurat

dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu tantangan yang harus dapat diimplementasikan. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang harus senantiasa berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur agar pengembangan basis data pembangunan selalu dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari aspek penataan ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai institusi perencana tidak terkait langsung dengan pemanfaatan ruang, namun melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai kewenangan untuk mengoordinasikan SKPD terkait dalam merencanakan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan RTRW dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tantangan yang dihadapi terkait dengan penataan ruang adalah bagaimana mengimplementasikan rencana pembangunan yang telah dituangkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang dengan tetap memperhatikan KLHS agar pemanfaatan ruang kota dapat lebih terarah. Hal ini disebabkan karena RTRW adalah dokumen yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang dan menjadi matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Di samping tantangan tersebut, peluang yang dapat dimanfaatkan dari RTRW Kota Bontang, adalah adanya program/kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai struktur dan pola ruang kota yang diharapkan sampai akhir tahun perencanaan. Dengan adanya rencana program/kegiatan ini, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai kewajiban untuk mendorong SKPD melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Disamping itu, RTRW harus dimanfaatkan sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Secara garis besar, tantangan yang diperkirakan dihadapi dalam rangka pengembangan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2016 - 2021 antara lain:

- ☐ Meningkatnya tuntutan masyarakat akan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas, partisipatif, transparan dan akuntabel;

- ❑ Masih relatif rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;
- ❑ Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- ❑ Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun baik oleh internal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan maupun oleh Dinas Teknis terkait;
- ❑ Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, sehingga untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum dapat terlaksana dengan baik pada proses penganggaran;
- ❑ Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- ❑ Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan SKPD lain;
- ❑ Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
- ❑ Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;

Sedangkan Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2016 - 2021 antara lain:

- ❑ Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- ❑ Adanya dukungan yang kuat dari Walikota/Wakil Walikota terhadap Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- ❑ Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

- ☐ Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam perencanaan pembangunan kota;
- ☐ Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.
- ☐ Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- ☐ Adanya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;
- ☐ Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencana, memantapkan kelembagaan perencanaan, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang

Salah satu informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Analisis gambaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang dan identifikasi isu-isu strategis sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel. 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	Pelayanan permohonan rekomendasi tataruang belum efektif	- UU 26/2007; - PP 8/2013; - Permen PU No. 11/PRT/M/2009; - Permen PU No. 20 Tahun 2011; - Permen PU No. 01/PRT/M/2013; - Perda Prov. Kaltim No. (RTRW Prov); - Perda Kota Bontang No. 11 Tahun 2012	- Kecepatan agenda Rakor BKPRD; - Kecermatan telaah terhadap ketentuan peraturan perundangan - Ketersediaan dokumen pendukung (RDTR)	- Kelengkapan info/dok. pemohon - Kesesuaian lokasi existing dengan dokumen (sertifikat)	Kurangnya dokumen pendukung RTRW
	Penyusunan perencanaan daerah tahunan dan lima tahunan belum efektif	- UU 25/2004; - PP 8/2008; - Permendagri 54/2010 - Perda RPJP - Perda RPJM - Perda Pembentukan - Perda Kota Bontang No. 11 Tahun 2012 - Perwali SOTK	- Ketersediaan aplikasi perencanaan - Ketersediaan sarana dan prasarana kerja - Kecermatan verifikasi - Kemampuan aparatur perencana - Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda - Koordinasi antar bidang/sub bidang	- Pemahaman stakeholder akan arti penting perencanaan - Perbedaan antara data sektoral dan data dari BPS - Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD Prov.	- Belum optimalnya hasil perencanaan - Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				- Informasi kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi - Ketepatan dan kecermatan data dan usulan pembangunan	
	Fasilitas penelitian dan pengembangan IPTEK kepada institusi dan masyarakat belum dilaksanakan	- Perda (Pembentukan SKPD) - Perwali SOTK	- Inventarisasi penelitian/penemuan yang ada di Bontang - Kemampuan aparatur peneliti - Ketersediaan sarana dan prasarana kerja	- Kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan IPTEK untuk penelitian - Keberadaan lembaga/institusi penelitian	Pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penelitian belum berjalan baik.
Kajian terhadap Renstra Bappeda Provinsi Kaltim	- Koordinasi perencanaan pembangunan dengan Bappeda Provinsi telah berjalan dengan baik - Pelaporan hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan penyerapan anggaran ke Bappeda Provinsi telah tepat waktu - Sasaran Bappeda Provinsi belum sepenuhnya selaras dengan sasaran Bappeda Kota Bontang	- UU 25/2004; - PP 8/2008; - Permendagri 54/2010	- Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang	- Dukungan data dan informasi dari Provinsi dan SKPD	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan sektoral dan kewilayahan
Kajian terhadap Renstra Bappenas	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan fungsional perencanaan yang difasilitasi oleh Bappenas masih sangat kurang	- Perda (Pembentukan SKPD) - Perwali SOTK	- Manajemen sumber daya manusia - Minat aparatur terhadap Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	- Ketersediaan/ peluang diklat perencanaan/ substantif oleh Bappenas	Kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan masih belum memadai

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kajian terhadap RTRW	- Telah memiliki Perda RTRW - Telah dicapai kesesuaian tata ruang 78% - Koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah dilakukan oleh BKPRD - Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	- UU No.26 Tahun 2006 - Perda Kota Bontang No. 11 Tahun 2012	- Ketersediaan SDM yang secara fungsional memahami norma, standar, pedoman dan kebijakan di bidang penataan ruang	- Kondisi eksisting pemanfaatan tata ruang - konsistensi penegakan Perda - pemahaman masyarakat akan RTRW	Belum tersusunnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang
Kajian terhadap KLHS	- Telah disusun KLHS RPJMD dan RTRW - Kajian/penelitian/ evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan masih sangat kurang - Koordinasi, pengendalian dan evaluasi terhadap dampak negatif akibat pembangunan lebih ditingkatkan lagi.	- UU 32/2009 - Perda (Pembentukan - Perwali SOTK	- Ketersediaan aparatur yang secara fungsional memahami proses penelitian dan evaluasi - Koordinasi antar bidang/sub bidang	- Dukungan data dan informasi dari SKPD - Keberadaan lembaga/institusi penelitian	Belum optimalnya koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap dampak negatif akibat pembangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bontang terpilih sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah: **“Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Umum dan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang, maka fungsi dan tugas Bapelitbang terkait erat dengan misi 1, yaitu: *“menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia”*.

Rumusan tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian Misi 1 yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bapelitbang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Menjadikan Kota Bontang sebagai <i>Smart City</i> melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
(1)	(2)	(3)	Penghambat (4)	Pendorong (5)
1	<u>Misi 1</u> Menjadikan kota Bontang sebagai <i>Smart City</i> melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih belum optimal - Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal	- Masyarakat belum sepenuhnya memahami proses perencanaan pembangunan karena kurangnya sosialisasi peraturan - Adanya intervensi politik - Otorisasi penganggaran berada pada instansi lain sehingga sering terjadi usulan yang sudah direncanakan tereduksi pada saat penganggaran - Kualitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan masih belum memadai - Kualitas data dan informasi yang belum dapat diandalkan - Lemahnya mekanisme pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	- Komposisi keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sudah baik dan merata - Adanya petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang - Adanya aplikasi <i>e-planning</i> (SIPPADU) yang memungkinkan transparansi dan kemudahan akses informasi publik terkait perencanaan pembangunan - Peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk kualitas sumber daya manusia - Perbaikan pengelolaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan - Integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan
2	<u>Misi 2</u> Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Perencanaan tata ruang masih belum optimal - Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW masih belum sesuai target	- Belum adanya foto udara terbaru yang dapat digunakan dalam penelaahan terhadap perencanaan tata ruang - Ketidaktahuan masyarakat mengenai RTRW karena kurangnya sosialisasi - Lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian dari dinas terkait	- Tersusunnya perencanaan dan kajian yang bersifat komprehensif dan mendukung penataan ruang yang sudah ditentukan di dalam dokumen RTRW Kota Bontang - Sosialisasi kepada masyarakat mengenai RTRW - Adanya forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang mengawasi dan memonitor penggunaan dan pemanfaatan ruang wilayah serta pengembangan perencanaan kawasan industri di wilayah Kota Bontang.

3.3 Telaahan Renstra Kemeterian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan tugas pokok (berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007) adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan sasaran jangka menengahnya sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari Tujuan Pertama: "Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas" adalah:
 - Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dan pengawasan;
 - Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN;
 - Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKPP.
2. Sasaran strategis dari Tujuan Kedua: "Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas", adalah:
 - Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya.
3. Sasaran strategis dari Tujuan Ketiga: "Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas", adalah:
 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Dari 5 (lima) sasaran jangka menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas, hanya

terdapat 1 (satu) sasaran yang mencakup sasaran jangka menengah Bapelitbang Kota Bontang periode 2011-2016, yaitu sasaran: "Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan".

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Bontang yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	• Belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Bapelitbang • Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan belum sepenuhnya baik • Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat	• Lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan • Otorisasi penganggaran berada pada instansi lain	• Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai • Kerjasama yang baik antar bidang dan antar instansi • Integrasi pada aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan

Sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan sebagai berikut:

1. Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran;

2. Meningkatnya kualitas data/informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah; dan
3. Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut hanya ada 1 sasaran yang mencakup sasaran jangka menengah Bapelitbang Kota Bontang, yaitu sasaran kedua: "Meningkatnya kualitas data/informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

Permasalahan pelayanan Bapelitbang Kota Bontang berdasarkan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kaltim beserta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Prov. Kalimantan Timur	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Bontang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas data/ informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah	- Masih belum optimalnya kualitas data/ informasi - Masih adanya perbedaan antara data sektoral dengan data dari BPS - Masih belum optimalnya fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah	- Lemahnya mekanisme pengelolaan data dan informasi - Masih adanya ego sektoral	- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal - Kualitas SDM yang memadai - Kerjasama yang baik antar bidang dan antar instansi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW Kota Bontang disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Bontang. RTRW Kota Bontang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; rencana struktur ruang wilayah kota; rencana pola ruang wilayah kota; penetapan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

RTRW Kota Bontang tahun 2012-2032 yang sudah ditetapkan akan berimplikasi

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbang. Tantangan pelayanan yang dihadapi terkait tugas dan fungsinya adalah Bapelitbang turut berperan dalam: (1) mewujudkan struktur dan pola ruang, (2) mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, (3) perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang, dan (4) mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah dalam lingkup kota melalui penyusunan perencanaan dan pengkajian sesuai arahan RTRW.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perlunya menyusun perencanaan tata ruang untuk pendukung RTRW	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang untuk pendukung RTRW belum memadai	- Ketersediaan SDM yang secara fungsional memahami norma, standar, pedoman dan kebijakan dibidang penataan ruang masih kurang - Keterbatasan anggaran	Telah memiliki Perda RTRW
2.	Perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang	Pemahaman masyarakat akan RTRW masih kurang	- Kegiatan sosialisasi belum efektif - Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang masih kurang	Telah dikembangkan Sistem Informasi Geospasial
3.	Mengoptimalkan peran BKPRD dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah	Peran BKPRD belum optimal	Koordinasi antar sektor masih lemah	Kelembagaan BKPRD telah terbentuk
4.	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai arahan RTRW	Belum optimalnya Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang melalui SIG	- Ketersediaan SDM yang secara fungsional memahami norma, standar, pedoman dan kebijakan dibidang penataan ruang masih kurang - Kurangnya pengawasan	- Konsistensi penegakan Perda RTRW - Telah dicapai kesesuaian tata ruang - Dukungan data dan informasi dari instansi terkait

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dimasa depan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah dengan mengintegrasikan kepentingan

lingkungan pada arah pengambilan keputusan strategis yakni pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) melalui aplikasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS tidak hanya merupakan kajian dampak lingkungan yang bersifat formal dan mengikuti tata prosedur tertentu, tetapi lebih dari itu, juga merupakan suatu kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang terbaik. KLHS sendiri juga merupakan pendekatan proaktif untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam KRP.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	- Terdapat 8 rekomendasi yang harus diimplementasikan kedalam rencana tahunan (RKPD/Renja) - Bappeda perlu mengalokasikan anggaran memadai untuk implementasi rekomendasi KLHS - Bappeda melalui Pokja PL wajib mengawal proses pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke dalam Renstra SKPD - Bappeda melalui Pokja PL wajib mengawal proses perencanaan dan penganggaran tahunan untuk memastikan bahwa Rekomendasi KLHS diimplementasikan ke dalam RKPD dan Renja SKPD dan dialokasikan anggaran yang memadai	- Dokumen KLHS untuk penyusunan dokumen perencanaan belum dilaksanakan pada penyusunan RPJMD/Renstra periode sebelumnya - Rekomendasi KLHS belum sepenuhnya diimplementasikan dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan	- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan - Pemahaman pentingnya dokumen KLHS sebagai telaahan dan kajian dalam proses perencanaan masih rendah - Peran pokja PL dalam melakukan monitoring implementasi rekomendasi KLHS belum optimal	- Komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup - Dukungan data dan informasi dari SKPD - Ketersediaan aparatur yang secara fungsional memahami proses penelitian dan evaluasi - Telah disusun dokumen KLHS RPJMD dan RTRW
2.	Pemerintah Kota Bontang harus tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak negatif akibat pembangunan di daerah meskipun tidak memiliki kewenangan lagi dalam sektor-sektor pembangunan tertentu terkait implementasi UU No. 23 Tahun 2014, terkait dengan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, pertambangan, dan perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi/pusat.	Koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan belum berjalan efektif	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	- Ketersediaan aparatur yang secara fungsional memahami proses penelitian dan evaluasi - Dukungan data dan informasi dari SKPD - Koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
3.	Perlunya upaya untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas dari Pemerintah Kota dan perguruan tinggi untuk mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan di daerah melalui pelaksanaan KLHS.	Kajian terhadap dampak lingkungan akibat pelaksanaan program pembangunan masih kurang	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses kerjasama penelitian dan pengembangan	- Keberadaan lembaga/institusi penelitian - Adanya kerjasama Pemerintah Kota Bontang dengan beberapa perguruan tinggi/institusi penelitian

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis dan telaahan terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah, Renstra Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, RTRW dan KLHS serta dengan memperhatikan dinamika nasional maupun regional maka telah diidentifikasi isu-isu strategis berupa permasalahan pelayanan, peluang dan ancaman bagi Badan Perencanaan dan Litbang di masa lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Identifikasi Isu-isu Strategis

Aspek	Isu Strategis
Perencanaan	Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran belum optimal Belum optimalnya perencanaan penataan ruang
Pengendalian dan Evaluasi	Mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan belum efektif Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi atas pemanfaatan ruang
Kelembagaan	Kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan masih belum memadai Belum tersusunnya standar kinerja dan prosedur kerja yang efektif
Data dan Informasi	Belum adanya sistem pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management system</i>) Belum optimalnya kualitas, pengelolaan, dan pemanfaatan data pembangunan
Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya koordinasi penelitian dan pengembangan serta penerapan hasil kajian Pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penelitian dan pengembangan belum berjalan baik.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis diatas kemudian akan ditentukan isu-isu strategis utama pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang dengan menggunakan metode

pembobotan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria dan skor terhadap masing-masing kriteria, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	25
2	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
5	Perlu segera mendapatkan penanganan	25
	Total	100

2. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut di atas, dengan mengisi tabel berikut;

Tabel 3.9
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kinerja perencanaan pembangunan						
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						
2	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan						
3	Belum optimalnya konsistensi antara perencanaan, dan penganggaran						
4	Belum optimalnya perencanaan penataan ruang						
	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan						
5	Belum optimalnya mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan						
6	Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi atas pemanfaatan ruang						
	Kapasitas kelembagaan						
7	Kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan masih belum memadai						
8	Belum tersusunnya standar kinerja dan prosedur kerja yang efektif						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah						
9	Belum adanya sistem pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management system</i>)						
10	Belum optimalnya kualitas, pengelolaan, dan pemanfaatan data pembangunan						
	Koordinasi dan pelaksanaan fungsi Penelitian dan pengembangan						
11	Belum optimalnya koordinasi penelitian dan pengembangan serta penerapan hasil kajian						
12	Pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penelitian dan pengembangan belum berjalan baik.						

3. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis.

Penilaian atas isu-isu strategis pada tabel 3.8 dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada tabel 3.9. Hasil pembobotan dan penentuan peringkat isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kota Bontang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Hasil Pembobotan dan Penentuan Peringkat Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kinerja perencanaan pembangunan daerah	2323	580.75
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	630	90.00
2	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	539	77.00
3	Belum optimalnya konsistensi antara perencanaan, dan penganggaran	619	88.43
4	Belum optimalnya perencanaan penataan ruang	535	76.43
	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	1116	558.00
5	Belum optimalnya mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	609	87.00
6	Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi atas pemanfaatan ruang	507	72.43
	Kapasitas kelembagaan	1258	629.00
7	Kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan masih belum memadai	617	88.14
8	Belum tersusunnya standar kinerja dan prosedur kerja yang efektif	641	91.57

(1)	(2)	(3)	(4)
	Ketersediaan data dan informasi pembangunan	1176	588.00
9	Belum adanya sistem pengelolaan pengetahuan (knowledge management system)	615	87.86
10	Belum optimalnya kualitas, pengelolaan, dan pemanfaatan data pembangunan	561	80.14
	Koordinasi dan pelaksanaan fungsi Penelitian dan pengembangan	1115	557.50
11	Belum optimalnya koordinasi penelitian dan pengembangan serta penerapan hasil kajian	568	81.14
12	Pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penelitian dan pengembangan belum berjalan baik.	547	78.14

Berdasarkan hasil analisis penentuan isu-isu strategis, maka dirumuskan isu-isu utama yang dihadapi Badan Perencanaan dan Litbang pada periode 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Peran lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan penyesuaian seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik dari lingkungan nasional maupun global. Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan dan Litbang selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bontang sesuai amanat RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021. Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan dan Litbang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas, profesional dan bertanggungjawab.

2. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan berkualitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional pada pasal 31 : Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Hal ini berarti data yang diperoleh haruslah berupa fakta bukan hasil manipulasi ataupun rekayasa. Dengan memiliki basis data dan informasi yang valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan. Karena pembangunan merupakan proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Ketersediaan data yang aktual dan akurat amat dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Untuk mendapatkan data yang akurat ini pada level tertentu sangat sulit diperoleh belum lagi ditambah dengan kesulitan mendapatkan data yang terbaru (up to-date). Tanpa data yang akurat dan up to-date, hasil evaluasi dan perencanaan akan menghasilkan data ataupun informasi yang keliru. Hal ini akan mengakibatkan salahnya perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya. Permasalahan-permasalahan tersebut terutama ditimbulkan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, diluar ketersediaan SDM maupun biaya untuk proses pengumpulan dan pengolahan data yang terbatas.

3. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan evaluasi.

Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat juga akan sangat mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan secara efektif serta akan mendukung proses perencanaan secara keseluruhan. Optimalisasi sistem informasi perencanaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan kualitas perencanaan. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses perencanaan pembangunan adalah

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.

Isu penting yang juga perlu diperhatikan adalah keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara aspek perencanaan dengan penganggaran, dan antar satuan unit kerja. Hal ini sangat penting karena target capaian suatu program dan kegiatan dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar perangkat daerah. Idealnya, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron antara tahap satu dengan yang lain, karena penganggaran merupakan modal awal untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan.

4. Efektifitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan-kegiatan koreksi, evaluasi, dan penyesuaian selama pelaksanaan program/kerja oleh Perangkat Daerah. Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi, baik secara metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya merupakan salah satu ciri dari penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang sebagai institusi perencana berkewajiban meningkatkan penerapan kaidah pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang indikator keberhasilannya ditandai dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terhadap sasaran RPJMD, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Bontang bertanggung jawab langsung terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban kinerja dimana indikatornya adalah penjabaran program RPJMD kedalam RKPD yang mutlak 100% setiap tahunnya, sehingga untuk mencapai beberapa target kinerja tersebut maka tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kota Bontang adalah sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Mewujudkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	1. Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	90%	92%	94%	96%	98%	100%
		Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/Sasaran RPJMD		2. Persentase akurasi data SIPD	90%	90%	100%	100%	100%	100%
			2. Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan	1. Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	79,9%	80%	85%	90%	100%	100%
				2. Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	80%	80%	85%	90%	95%	100%
				3. Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	15%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%
				4. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti	90%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			3.	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	1	proses perencanaan pembangunan Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/Sasaran RPJMD	80%	80%	85%	90%	95%	100%	
					2	Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
			4	Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah		57%	60%	65%	67%	69%	70%	

4.2. Strategi Dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Bapelitbang menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan metode **SWOT** (**Strengths** / kekuatan, **Weaknesses** / kelemahan, **Opportunities** / peluang, dan **Threats** / tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

Kekuatan (Strength):

- Tersedianya sarana dan prasarana kerja memadai;
- Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai;
- Suasana kerja yang demokratis dan dinamis;
- Peran Bapelitbang dalam perumusan kebijakan cukup strategis;
- Akses terhadap informasi pembangunan tinggi;
- Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai;
- Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah mulai dibangun dan dikembangkan.

Kelemahan (Weaknesses):

- Kompetensi aparatur belum optimal;
- Disiplin kerja aparatur kurang optimal;
- Tatalaksana organisasi belum optimal;
- Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal;

- Kualitas data dan sistem informasi belum optimal;
- Lemahnya team work dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal;
- Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur;
- Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan;

Peluang (Opportunities):

- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi;
- Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi;
- Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain;
- Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Ancaman (Threats):

- Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam;
- Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan dan hasil kajian yang dihasilkan oleh Bapelitbang;
- Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal;
- Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras dan berubah sangat cepat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

1. ***Strategi S-O***, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. ***Strategi S-T***, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
3. ***Strategi W-O***, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
4. ***Strategi W-T***, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Hasil analisis yang dilakukan dengan metode SWOT terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal menghasilkan berbagai alternatif strategi sebagaimana tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Penentuan alternatif strategi

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (O) 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi. 2. Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi. 3. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain. 4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.	ANCAMAN (T) 1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam. 2. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan dan hasil kajian yang dihasilkan oleh Bapelitbang. 3. Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal. 4. Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras dan berubah sangat cepat.
KEKUATAN (S) 1. Sarana dan prasarana kerja memadai 2. Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai 3. Suasana kerja yang demokratis dan dinamis 4. Peran instansi dalam perumusan kebijakan cukup strategis 5. Akses terhadap informasi pembangunan tinggi 6. Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai 7. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah mulai dibangun dan dikembangkan.	Alternatif Strategi (S-O) 1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan. (S6-O1) 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. (S4-O2) 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan. (S4-O4) 4. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga dengan memanfaatkan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya. (S1,S2,S3,S4-O3,O4) 5. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi perencanaan pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan (S7-O1,O4) 6. Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga pemerintah lain. (S4-O3)	Alternatif Strategi (S-T) 1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat. (S2-T1) 2. Mengoptimalkan peran Bapelitbang untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan dan hasil kajian yang dihasilkan. (S4-T2) 3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal. (S3-T3) 4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras dan berubah sangat cepat. (S5-T4)
KELEMAHAN (W) 1. Kompetensi pegawai belum optimal 2. Disiplin kerja aparat kurang optimal 3. Tatalaksana organisasi belum optimal 4. Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal 5. Kualitas data dan sistem informasi belum optimal 6. Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal; 7. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur 8. Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan;	Alternatif Strategi (W-O) 1. Meningkatkan potensi dan kompetensi SDM perencanaan melalui kerjasama dengan lembaga/pihak lain. (W1-O3) 2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi. (W5-O4) 3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi secara efektif. (W4-O2) 4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi melalui kerjasama pihak lain dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. (W3-O3,O4) 5. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan pengembangan manajemen pengelolaan data dan informasi. (W5,W8-O4)	Alternatif Strategi (W-T) 1. Mengoptimalkan tata laksana organisasi dan menyediakan standar kinerja yang terukur untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat. (W3,W7-T1) 2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat. (W1-T1) 3. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi yang akurat dan cepat untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan. (W5,W8-T2) 4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai. (W2-T3) 5. Membangun team work yang solid dengan mengoptimalkan potensi SDM untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan perencanaan yang lebih baik.(W6-T1)

Analisis dengan menggunakan metode SWOT menghasilkan beberapa alternatif strategi yang selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

Strategi

1. Mengoptimalkan tata laksana dan budaya organisasi yang berorientasi hasil melalui penyusunan standar kinerja yang terukur;
2. Meningkatkan potensi dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berkualitas baik yang diselenggarakan sendiri maupun dengan bekerjasama dengan lembaga/pihak lain;
3. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi yang akurat dan cepat untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Mengoptimalkan peran Bapelitbang untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan dan hasil kajian yang dihasilkan;
5. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi perencanaan pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan; dan
6. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi secara efektif.

Kebijakan

1. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mewujudkan budaya organisasi yang berorientasi hasil dan mampu menghadapi tantangan dan perubahan ke depan;
2. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional tertentu sesuai kebutuhan lembaga dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada aparatur untuk mengikuti diklat fungsional dan diklat teknis;
3. Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi serta pemantapan manajemen pengelolaan data;
4. Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di

bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga pemerintah lain;

5. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan;
6. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang berbasis teknologi informasi.

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	1.1 Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi yang akurat dan cepat untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan.	Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi serta pemantapan manajemen pengelolaan data
		1.2 Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan	Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi perencanaan pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan
		1.3 Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi secara efektif.	Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang berbasis teknologi informasi
		1.4 Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Mengoptimalkan peran Bapelitbang untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan dan hasil kajian yang dihasilkan.	Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga pemerintah lain.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan strategi, kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, dan hasil telaah terhadap visi, misi dan program prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2016–2021, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang menyusun program-program utama dan kegiatan sebagai berikut:

A. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016

Program dan kegiatan tahun 2016 disajikan secara terpisah dengan rencana program dan kegiatan tahun 2017 – 2021 mengingat bahwa tahun 2016 adalah masa transisi pelaksanaan RPJMD maupun Renstra periode 2011-2016. Program dan kegiatan tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun terakhir Renstra periode sebelumnya yang pada saat penyusunan Renstra periode 2016-2021 program dan kegiatan tersebut sedang dalam pelaksanaan sehingga tetap disajikan didalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan periode tahun 2016-2021.

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan tahun 2016

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016	
		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	3,014,595,823
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama setahun	100	246,340

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016	
		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan telepon dan internet	12 bulan	97,227,785
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor; kelengkapan printer	36 jenis; 27 jenis	142,446,950
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetakan, fotokopi; penjilidan, dan spanduk	15 jenis, fotokopi 1 tahun; jilid; 9 spanduk	80,795,550
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat elektronik dan listrik	4 jenis	4,100,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	59,417,246
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Surat kabar/majalah dan buku-buku peraturan	5 jenis	34,109,300
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan tamu	20 kali rapat dan 10 kali kunjungan tamu	79,186,500
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai	1 tahun	978,817,440
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	1,525,648,712
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan	KIR Kendaraan dan STNK	2 KIR; 20 STNK	12,600,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016	
		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas/Operasional			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	331,372,911
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas; penggantian suku cadang; penyediaan BBM	8 roda 4 dan 12 roda 2	299,672,675
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	5 jenis	31,700,236
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya tingkat kedisiplinan pegawai	100%	22,027,500
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian khusus hari-hari tertentu	45 set	22,027,500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100%	300,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai	1 tahun	300,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Meningkatnya pemenuhan data informasi pembangunan daerah	100%	33,980,000
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Buku database 8 kelompok data informasi pembangunan daerah	1 dokumen	33,980,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016	
		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Terwujudnya keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan, dan keterkaitan pembangunan antar wilayah baik dalam wilayah maupun dengan wilayah sekitar	25%	499,774,000
Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kajian peninjauan kembali RTRW Kota Bontang 2012-2032; KLHS RTRW Kota Bontang 2012-2032; Kajian Revisi RTRW Kota Bontang	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	499,774,000
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	80%	14,200,000
Koordinasi Penataan Ruang	Laporan BKPRD Kota Bontang	1 dokumen	14,200,000
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	Tersedianya rencana pengembangan kota di sektor sanitasi	100%	16,800,000
Koordinasi Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Memorandum Program Sanitasi; Laporan Pokja Sanitasi/AMPL Kota Bontang	1 dokumen; 1 dokumen	16,800,000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pemenuhan dokumen perencanaan	100%	2,576,201,176

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016	
		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)
	pembangunan daerah yang sesuai ketentuan		
Penyusunan Rancangan RPJMD	Rancangan dokumen RPJMD Kota Bontang 2016-2021; Dokumen KLHS RPJMD	1 dokumen; 1 dokumen	724,216,000
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Dokumen Berita Acara Musrenbang RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021	2 dokumen	24,300,000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Laporan pelaksanaan Musrenbang Kota Bontang	1 dokumen	173,374,938
Penetapan RKPD	Dokumen Peraturan Walikota tentang RKPD 2016	1 dokumen	2,500,000
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota	1 dokumen	30,900,000
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen laporan hasil monitoring evaluasi pembangunan	4 dokumen	30,806,262
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim	4 dokumen	3,000,000
Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Kota Bontang	Fasilitasi operasional Unit Layanan Pengadaan	1 tahun	1,287,345,176

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016	
		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Kebijakan dan Program kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial	100%	36,170,000
Informasi Laporan Penyelenggaraan Program Unggulan Pembangunan Daerah	Dokumen program unggulan pembangunan daerah	1 dokumen	9,463,800
Koordinasi Laporan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Informasi penyerapan penyelenggaraan APBD melalui sistem monitoring TEPR	100%	14,800,000
Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman	Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM); Laporan Satgas RPI2JM Kota Bontang	1 dokumen; 1 dokumen	6,325,000
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Aplikasi e-planning	1 aplikasi	233,000,000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan ekonomi daerah	100%	45,700,502
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan perencanaan pembangunan ekonomi	1 dokumen	22,206,402
Koordinasi Tingkat Kota Program Nasional Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK)	Koordinasi dan fasilitasi Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas	100%	6,000,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016	
		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan	100%	17,494,100
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan sosial budaya	100%	229,873,452
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Dokumen aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan monev sosbud dan kegiatan bidang sosbud	1 dokumen	48,532,200
Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat	8 tatanan	181,341,252
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik daerah	100%	339,596,000
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat; Buku Indeks Pembangunan Manusia	1 dokumen; 1 dokumen	109,420,000
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Dokumen PDRB	1 dokumen	115,389,000
Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Dokumen Data Statistik Daerah	1 dokumen	114,787,000
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan	100%	156,010,000
Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi media	1 tahun	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016	
		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)
	massa		156,010,000
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Meningkatnya informasi data perencanaan pembangunan Kota Bontang	100%	19,000,000
Pengoperasian dan Pemeliharaan Website Bappeda	Tersedianya informasi hasil pembangunan melalui website Bappeda	100%	19,000,000
J U M L A H			7,599,131,364

B. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2017-2021

1. Program Pengembangan Data/Informasi
 - ✓ Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 - ✓ Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA).
2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
 - ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial;
 - ✓ Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - ✓ Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah;
 - ✓ Penyusunan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan ruang Wilayah Kota;
 - ✓ Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Tanah.
3. Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - ✓ Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - ✓ Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum;
 - ✓ Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah;

- ✓ Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air;
 - ✓ Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir;
 - ✓ Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan;
 - ✓ Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 - ✓ Kajian Akademik Smart City Kota Bontang;
 - ✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Pariwisata.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- ✓ Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
 - ✓ Penetapan RKPD;
 - ✓ Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan;
 - ✓ Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan;
 - ✓ Penyusunan Review RPJMD;
 - ✓ Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD;
 - ✓ Penyusunan Rancangan RPJMD;
 - ✓ Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;
 - ✓ Informasi Laporan Penyelenggaraan Program Unggulan Pembangunan Daerah;
 - ✓ Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan;
 - ✓ Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Segendis Kota Bontang;
 - ✓ Feasibility Study Wisata Bahari Kota Bontang;
 - ✓ DED Pembangunan Pelabuhan Segendis Kota Bontang;
 - ✓ Feasibility Study Kota Religi Kota Bontang;
 - ✓ Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan;
 - ✓ Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan;
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- ✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
 - ✓ Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi;
 - ✓ Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang;
 - ✓ Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sektor Maritim.
6. Program Perencanaan Sosial Budaya
- ✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;

- ✓ Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pendidikan;
 - ✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Mental dan Spiritual;
 - ✓ Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang Kesehatan;
 - ✓ Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - ✓ Koordinasi Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S);
 - ✓ Evaluasi Kinerja Penanggulangan Kemiskinan;
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat;
 - ✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur.
7. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- ✓ Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
 - ✓ Koordinasi TEPPRA Kota Bontang;
 - ✓ Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim;
 - ✓ Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi;
8. Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik
- ✓ Penyusunan Analisis PDRB;
 - ✓ Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan;
 - ✓ Penyusunan dan Pengumpulan Data Pembangunan;
 - ✓ Rapat Sinkronisasi Data Pembangunan Se-Kaltim;
 - ✓ Penyusunan Laporan Tahunan Kota Bontang;
 - ✓ Penyusunan Analisis Input-Output;
 - ✓ Koordinasi Penelitian dan Pengembangan;
 - ✓ Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
 - ✓ Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan;

Untuk menunjang pencapaian sasaran program-program utama tersebut diatas, ditetapkan juga program-program pendukung, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- ✓ Penyediaan Jasa Surat-Menyurat;
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan;
 - ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - ✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - ✓ Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - ✓ Peningkatan Kinerja Aparatur;
 - ✓ Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Character Building;
 - ✓ Pendidikan dan Parenting Skill.
 5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 - ✓ Pelaksanaan Pameran Pembangunan;
 - ✓ Publikasi Kegiatan Pembangunan.
 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - ✓ Pengoperasian dan Pemeliharaan Website.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang periode 2017– 2021 selengkapnya digambarkan dalam tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mewujudkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	1	25	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tingkat keterisian SIPD	80%	82%	31.440.000	84%	34.584.000	86%	38.042.000	88%	41.847.000	90%	41.847.000	90%	187.760.000	BID. P3EP
						Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Buku Database 8 Kelompok Data Informasi	1 dokumen	1 dok	31.440.000	1 dok	34.584.000	1 dok	38.042.000	1 dok	41.847.000	1 dok	41.847.000	5 dok	187.760.000	
		Persentase akurasi data SIPD	0	00	11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Tersedianya website dengan data yang akurat dan terkini	1 website	1 website	49.490.000	1 website	54.439.000	1 website	59.883.000	1 website	65.871.000	1 website	65.871.000	1 website	295.554.000	BID. P3EP
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Website	Website Bappeda Kota Bontang	1 paket	1 paket	49.490.000	1 paket	54.439.000	1 paket	59.883.000	1 paket	65.871.000	1 paket	65.871.000	1 paket	295.554.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan	Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	1	25	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD	1;1;1	1;1;1	2.045.000.009	1;1;1	3.293.000.011	1;1;1	2.265.000.013	1;1;1	2.325.000.015	1;1;1	2.704.000.017	1;1;1	12.632.000.065	BID. P3EP BID. EPSPA BID. PPW
		Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen hasil kompilasi usulan Musrenbang	1 dokumen	1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000	5 dok	1.250.000.000	
		Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD				Penetapan RKPD	(1) Dokumen Rancangan Awal RKPD. (2) Dokumen Rancangan RKPD. (3) Dokumen Perwali	3 dokumen	3 dok	200.000.000	3 dok	200.000.000	3 dok	200.000.000	3 dok	200.000.000	3 dok	200.000.000	15 dok	1.000.000.000	
						Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	1 aplikasi	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	1.000.000.000	
						Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan	Dokumen RKPD Perubahan	1 dokumen	1 dok	45.000.000	1 dok	45.000.000	1 dok	45.000.000	1 dok	45.000.000	1 dok	45.000.000	5 dok	225.000.000	
						Penyusunan Review RPJMD	Dokumen Review RPJMD					1 dok	350.000.000						1 dok	350.000.000	
						Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratis RPJMD		-	-	-	-	-	1 dok	350.000.000	-	-	1 dok	350.000.000		
						Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Rancangan RPJMD		-	-	-	-	-	-	-	1 dok	550.000.000	1 dok	550.000.000		
						Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Berita Acara Kesepakatan Periode Pembangunan RPJMD 2021-2026		-	-	-	-	-	-	-	1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Informasi Laporan Penyelenggaraan Program Unggulan Pembangunan Daerah	Laporan Penyelenggaraan Program Unggulan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dok	50.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	70.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	9.000.000	5 dok	269.000.000	
				Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Laporan Pelaksanaan Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	1 dokumen	1 dok	500.000.000	1 dok	550.000.000	1 dok	600.000.000	1 dok	650.000.000	1 dok	650.000.000	5 dok	2.950.000.000	
				Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Segendis Kota Bontang	Dokumen Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Segendis Kota Bontang	-	1 dok	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	800.000.000		
				Feasibility Study Wisata Bahari Kota Bontang	Dokumen Feasibility Study Wisata Bahari Bontang	-	-	-	1 dok	468.000.000						1 dok	468.000.000		
				DED Pembangunan Pelabuhan Segendis	Dokumen DED Pembangunan Pelabuhan Segendis Kota Bontang	-	-	-	1 dok	420.000.000						1 dok	420.000.000		
				Feasibility Study Kota Religi Kota Bontang	Dokumen Fisibility Study Wisata Religi	-	-	-	1 dok	550.000.000						1 dok	550.000.000		
				Bimtek Perencanaan Pembangunan	Persentase SKPD yang mengikuti bimtek	-	-	-	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	
				Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan	Dokumen kebijakan teknis perencanaan	-	-	-	1 dok	300.000.000	1 dok	300.000.000	1 dok	300.000.000	1 dok	300.000.000	4 dok	1.200.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			12522	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang ekonomi	n/a	100%	340.000.000	100%	357.000.000	100%	392.700.000	100%	431.970.000	100%	431.970.000	100%	1.953.640.000	BID. EPSPA
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	1 dok	80.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	5 dok	420.000.000	
				Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Laporan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan ekonomi	1 dokumen	1 dok	60.000.000	1 dok	67.000.000	1 dok	65.000.000	1 dok	81.970.000	1 dok	81.970.000	5 dok	355.940.000	
				Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang	Dokumen Kajian Potensi Bidang Ekonomi untuk menunjang creative city	-	-	-	1 dok	230.000.000	1 dok	247.700.000	1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000	4 dok	977.700.000	
				Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sektor Maritim	Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sektor	-	1 dok	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	200.000.000	
			12523	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur			425.000.009	10	467.500.000	12	514.250.000	14	565.675.000	16	565.675.000		2.538.100.009	BID. EPSPA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor sosial dan budaya (KLA, GSI, Pokja Posyandu, Laporan Rencana Aksi Pencapaian Inpres No 3 Tahun 2010, SDG's, RTM, PKH)	1 dokumen	1 dok	80.000.000	1 dok	87.999.998	1 dok	96.799.998	1 dok	106.479.998	1 dok	106.479.998	5 dokumen	477.759.992	
					Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pendidikan	Laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan	1 dokumen	1 dok	20.000.000	1 dok	22.000.000	1 dok	24.199.999	1 dok	26.619.999	1 dok	26.619.999	5 dok	119.439.998	
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Mental dan Spiritual	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan mental dan spiritual	-	1 dok	20.000.000	1 dok	22.000.000	1 dok	24.199.999	1 dok	26.619.999	1 dok	26.619.999	5 dok	119.439.998	
					Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang Kesehatan	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor kesehatan	1 dokumen	1 dok	20.000.000	1 dok	22.000.000	1 dok	24.199.999	1 dok	26.619.999	1 dok	26.619.999	5 dok	119.439.998	
					Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan	-	1 dok	20.000.000	1 dok	22.000.000	1 dok	24.199.999	1 dok	26.619.999	1 dok	26.619.999	5 dok	119.439.998	
					Koordinasi Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)	Laporan koordinasi P4S	-	1 dok	20.000.000	1 dok	22.000.000	1 dok	24.199.999	1 dok	26.619.999	1 dok	26.619.999	5 dok	119.439.998	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Evaluasi Kinerja Penanggulangan Kemiskinan	Laporan evaluasi penanggulangan kemiskinan	-	1 dok	20.000.000	1 dok	22.000.000	1 dok	24.199.999	1 dok	26.619.999	1 dok	26.619.999	5 dok	119.439.998		
					Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Dokumen Capaian Tatanan Kota Sehat	1 dokumen	1 dok	200.000.000	1 dok	219.999.995	1 dok	241.999.995	1 dok	266.199.994	1 dok	266.199.994	5 dok	1.194.399.979		
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	1 dokumen	1 dok	25.000.000	1 dok	27.499.999	1 dok	30.249.999	1 dok	33.274.999	1 dok	33.274.999	5 dok	149.299.997		
			1	25	28	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Ketersediaan pranata tata ruang kota dan wilayah	-	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000	1	402.627.500	1	1.678.902.500	BID. PPW
						Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	- Pengadaan sarana & prasarana pemetaan - Naskah Akademis Peraturan Daerah Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah	- -	1 paket 1 dok	100.000.000	- -	100.000.000	1 paket -	200.000.000 -	- -	100.000.000 -	2 paket 1 dok	700.000.000			
							- Norma Standar Prosedur dan Ketentuan (NSPK) Informasi Geospasial - Pelatihan Simpul Jaringan Kota Bontang - Laporan Simpul Jaringan Kota Bontang	- 50 orang -	- 50 orang 1 dok	 50 orang 1 dok	1 dok 50 orang 1 dok	 50 orang 1 dok	- 50 orang 1 dok	- 50 orang 1 dok	 50 orang 1 dok	2 dok 250 orang 5 dok					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	- Kajian Peninjauan Kembali RTRW Kota Bontang 2012-2032 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kota Bontang 2012-2032 - Kajian Revisi RTRW Kota Bontang	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dok 1 dok 1 dok	50.000.000						1 dok 1 dok 1 dok	252.627.500	2 dok 2 dok 2 dok	302.627.500			
					Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	- Laporan BKPRD Kota Bontang - Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah - Bahan Kampanye Penataan Ruang	2 dokumen - -	2 dok 3 kali -	75.000.000	2 dok 3 kali -	30.000.000 - 2 paket	2 dok - 2 paket	75.000.000 - 2 paket	2 dok - 2 paket	75.000.000 - 2 paket	2 dok - 2 paket	50.000.000	10 dok 6 kali 6 kali	305.000.000		
					Penyusunan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan ruang Wilayah Kota	Naskah Akademis Peraturan Daerah Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	1 dok	150.000.000	-	-	-	-	-	-	dokumen	150.000.000		
					Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Tanah	- Laporan Hasil Pemantauan - Dokumen Evaluasi Tahunan	- -	1 dok 1 dok	50.000.000	1 dok 1 dok	22.500.000 1 dok	1 dok 1 dok	57.750.000 1 dok	1 dok 1 dok	91.025.000			4 dok 4 dok	221.275.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			1	25	29	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam	1	1	415.000.000	1	456.500.000	1	502.150.000	1	552.365.000	1	552.365.000	1	2.478.380.000	BID. PPW
						Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- Memorandum Program Perumahan dan Pemukiman - Pendampingan Program KOTAKU - Laporan Pokja PKP Kota Bontang	- - -	1 dok 3 paket 1 dok	75.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	5 dok 6 paket 5 dok	335.000.000	
						Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	- Memorandum Program Sanitasi dan Air Minum - Laporan Pokja AMPL Kota Bontang - Bahan Kampanye Peduli Sanitasi	1 dokumen 1 dokumen 2 paket	1 dok 1 dok 2 paket	75.000.000	1 dok	55.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	65.000.000	1 dok	65.000.000	5 dok 5 dok 10 paket	310.000.000	
						Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	- Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kota Bontang - Laporan Satgas RPI2JM Kota Bontang	1 dokumen 1 dokumen	- -	-	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	40.000.000	1 dok	40.000.000	4 dok 4 dok	140.000.000	
						Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air	- Rencana Kerja - Laporan Pokja	- -	- -	-	1 dok 1 dok	25.000.000	1 dok 1 dok	25.000.000	1 dok 1 dok	35.000.000	1 dok 1 dok	35.000.000	4 dok 4 dok	120.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	- ICM Workshop	-	-	-	1 kali	100.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	200.000.000	1 kali	200.000.000	4 kali	580.000.000	
					- ICM Training	-	-	-	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali		
					- Database up-date	-	-	-	-		-		100%		-		100%		
					- State of Coast (SOC)	-	-	-	-		-		-		1 dok		1 dok		
					- Conflict	-	-	-	1 dok		1 dok		1 dok		-		3 dok		
					- Monitoring, evaluation & reporting	-	-	-	1 dok		1 dok		1 dok		-		3 dok		
					- Laporan Pokja ICM	-	-	-	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		4 dok		
				Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	- Memorandum Program Pembangunan Kota Berkelanjutan	-	-	-	1 dok	30.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	40.000.000	1 dok	40.000.000	4 dok	135.000.000	
					- Laporan Pokja URBAN LEDS Kota	-	-	-	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		4 dok		
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	RAD-GRK Kota	-	-	-	-	1 dok	200.000.000	-	-	-	-	1 dok	200.000.000	
				Kajian Akademik Smart City Kota Bontang	Dokumen Kajian Akademik Smart City Kota Bontang	-	1 dok	200.000.000								1 dok	200.000.000		
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Pariwisata	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi, dan pariwisata		1 dok	65.000.000	1 dok	116.500.000	1 dok	32.150.000	1 dok	122.365.000	1 dok	122.365.000	5 dok	458.380.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/Sasaran RPJMD	1	25	26	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				410.185.000		310.000.000		365.000.000		430.000.000		430.000.000		1.945.185.000	BID. P3EP
						Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen laporan Monitoring Evaluasi hasil RKPd dan hasil RPJMD	2 dokumen	2 Dok	30.000.000	2 Dok	65.000.000	2 Dok	75.000.000	2 Dok	80.000.000	2 Dok	80.000.000	10 dok	330.000.000	
		Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)				Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ	1 Dokumen	1 dok	30.000.000	1 dok	130.000.000	1 dok	150.000.000	1 dok	175.000.000	1 dok	175.000.000	5 dok	660.000.000	
						Koordinasi TEPPRA Kota Bontang	Isian data dalam aplikasi TEPPRA	1 dokumen	1 dok	25.185.000	1 dok	70.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	5 dok	375.185.000	
						Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim	Laporan Hasil Koordinasi Bappeda se-	-	1 dok	325.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	325.000.000		
						Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Laporan Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim	1 dokumen	-	-	1 dok	45.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	75.000.000	1 dok	75.000.000	4 dok	255.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam				PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	57%	60%	-	65%	428.345.000	67%	240.000.000	69%	319.000.000	70%	319.000.000	70%	1.306.345.000	Bidang P3EP
						Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan	-	-	-	1 dok	50.000.000	1 dok	120.000.000	1 dok	160.000.000	1 dok	160.000.000	4 dok	490.000.000	
						Penyusunan Roadmap SIDA	Dokumen Roadmap SIDA	-	-	-	1 dok	308.345.000	-	-	-	-	-	1 dok	308.345.000		
						Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase usulan kegiatan penelitian yang difasilitasi	-	-	-	50%	70.000.000	60%	120.000.000	70%	159.000.000	80%	159.000.000	80%	508.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Penunjang		0001	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.504.903.009	100%	1.655.394.000	100%	1.820.933.000	100%	2.003.026.000	100%	2.003.026.000	100%	8.987.282.009	Sekretariat
				Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Pelayanan Surat-Menyurat	12 bulan	12 bulan	600.000	12 bulan	660.000	12 bulan	726.000	12 bulan	798.600	12 bulan	798.600	12 bulan	3.583.200	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran telepon dan internet	12 bulan	12 bulan	131.400.000	12 bulan	144.540.060	12 bulan	158.994.031	12 bulan	174.893.408	12 bulan	174.893.408	12 bulan	784.720.908	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor; kelengkapan printer	36 jenis; 27 jenis	36 jenis; 27 jenis	87.180.000	36 jenis; 27 jenis	95.898.040	36 jenis; 27 jenis	105.487.821	36 jenis; 27 jenis	116.036.586	36 jenis; 27 jenis	116.036.586	36 jenis; 27 jenis	520.639.032	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	15 jenis	95.000.000	15 jenis	104.500.044	15 jenis	114.950.023	15 jenis	126.445.006	15 jenis	126.445.006	15 jenis	567.340.078	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen alat listrik	4 jenis	4 jenis	4.000.000	4 jenis	4.400.002	4 jenis	4.840.001	4 jenis	5.324.000	4 jenis	5.324.000	4 jenis	23.888.003	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis	82.240.000	6 jenis	90.464.038	6 jenis	99.510.420	6 jenis	109.461.445	6 jenis	109.461.445	6 jenis	491.137.348	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	26.400.011	12 bulan	29.040.006	12 bulan	31.944.002	12 bulan	31.944.002	12 bulan	143.328.020	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan	80.000.000	12 bulan	88.000.037	12 bulan	96.800.019	12 bulan	106.480.005	12 bulan	106.480.005	12 bulan	477.760.066	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	750.000.000	12 bulan	825.000.344	12 bulan	907.500.179	12 bulan	998.250.047	12 bulan	998.250.047	12 bulan	4.479.000.618		
					Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	7 Non PNS	7 Non PNS	237.883.000	7 Non PNS	261.671.409	7 Non PNS	287.838.487	7 Non PNS	316.622.288	7 Non PNS	316.622.288	7 Non PNS	1.420.637.472		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perijinan dan perpajakan	20 unit	20 unit	12.600.000	20 unit	13.860.006	20 unit	15.246.003	20 unit	16.770.601	20 unit	16.770.601	20 unit	75.247.210	Sekretariat	
			0	00	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	424.040.000	100%	466.444.000	100%	513.088.000	100%	564.397.000	100%	564.397.000	100%		2.532.366.000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 mobil;12 motor	8 mobil; 12 motor	393.740.000	8 mobil; 12 motor	433.114.000	8 mobil; 12 motor	476.425.029	8 mobil; 12 motor	524.067.717	8 mobil; 12 motor	524.067.717	8 mobil; 12 motor	2.351.414.463		
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	4 jenis	4 jenis	30.300.000	4 jenis	33.330.000	4 jenis	36.662.971	4 jenis	40.329.283	4 jenis	40.329.283	4 jenis	180.951.537		
			0	00	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinan aparatur	100%	100%	1.607.705.000	100%	1.768.476.000	100%	1.945.323.000	100%	2.139.855.000	100%	2.139.855.000	100%		9.601.214.000
					Peningkatan Kinerja Aparatur	Pembayaran tunjangan kinerja pegawai	12 bulan	12 bulan	1.607.705.000	12 bulan	1.743.476.000	12 bulan	1.945.323.000	12 bulan	2.114.855.000	12 bulan	2.139.855.000	12 bulan	9.551.214.000		
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah set pakaian yang diadakan	45 pasang	-	-	45 pasang	25.000.000	-	-	45 pasang	25.000.000	-	-	90 pasang	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			00010	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN	Persentase informasi/produk perencanaan Bappeda yang dipublikasikan	100%	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.400.000	100%	53.240.000	100%	53.240.000	100%	238.880.000	Sekretariat
				Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya kegiatan Bontang Expo dan Bontang City	-	-	-	2 event	22.000.000	2 event	24.200.000	2 event	26.620.000	2 event	26.620.000	2 event	99.440.000	
				Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi kegiatan pembangunan di media massa	12 bulan	12 bulan	40.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	24.200.000	12 bulan	26.620.000	12 bulan	26.620.000	12 bulan	139.440.000	
			00005	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis	50%	20%	230.933.600	30%	287.784.000	40%	316.562.000	50%	348.219.000	50%	348.219.000	50%	1.531.717.600	Sekretariat
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	37 pegawai	15 pegawai	150.933.600	19 pegawai	188.089.889	21 pegawai	206.898.616	23 pegawai	227.589.000	23 pegawai	227.589.000	101 pegawai	1.001.100.105	
				Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Persentase aparatur yang menyelesaikan pelatihan Character Building	-	100%	50.000.000	100%	62.308.820	100%	68.539.615	100%	75.393.750	100%	75.393.750	seluruh pegawai	331.635.934	
				Pendidikan dan Parenting Skill	Persentase aparatur yang menyelesaikan pendidikan dan parenting skill	-	100%	30.000.000	100%	37.385.292	100%	41.123.769	100%	45.236.250	100%	45.236.250	seluruh pegawai	198.981.560	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021, yang telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian integral pemerintah Kota Bontang berkewajiban untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD yang terkait langsung dengan indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah:

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.

Berdasarkan sasaran RPJMD diatas maka indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang terkait langsung adalah:

1. Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
2. Persentase penjabaran Kegiatan RKPD ke dalam APBD
3. Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam APBD
4. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
5. Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	79,9%	80%	85%	90%	100%	100%	79,9%
2.	Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam APBD	15%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%
3.	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/Sasaran RPJMD	80%	80%	85%	90%	95%	100%	80%

Selain indikator kinerja yang mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diatas, terdapat beberapa indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang disajikan pada tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
2.	Persentase akurasi data SIPD	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

3.	Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik (realisasi kinerja $\geq 76\%$)	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
4.	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada						Ada
6.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada			Ada			Ada
7.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang periode 2016-2021.

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kendali dan bahan evaluasi dalam pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang periode 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

